



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB II

MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN MELAYU DALAM PERSPEKTIF SEJARAH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyebarkan secara elektronik, mekanis, atau cara apapun tanpa izin dari Universitas Riau. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.unri.ac.id atau hubungi bagian hukum Universitas Riau. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman www.unri.ac.id atau hubungi bagian hukum Universitas Riau.



Bab II

MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN MELAYU DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

Asal-usul Masyarakat dan Budaya Melayu

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa, berbicara masalah masyarakat dan kebudayaan dalam konteks identitas, tidak terlepas dari persoalan-persoalan tradisi, kebiasaan, nilai, perilaku etnik, rasa memiliki, asal-usul dan sejarah etnik yang bersangkutan, selain itu juga mengetahui sesuatu tentang budaya yang diwariskan dalam etnik tersebut. Karena itu, untuk mengkaji masalah budaya Melayu Riau dalam tulisan ini dimulai dengan asal-usul masyarakat Melayu, dilanjutkan dengan proses perkembangan budaya yang bersangkutan.

Istilah Melayu berasal dari kata mala (yang berarti mula) dan yu (yang berarti negeri) dikenal sekitar tahun 644 masehi, melalui tulisan Cina yang berbunyi dengan kata Mo-lo-you (Burhanuddin Elhulaimy, 1963). Kata Melayu menurut Polinesia atau Austronesia merujuk kepada kata yang pernah menjadi anak negeri Kerajaan Melayu Jambi (sekitar abad ke 4-5) diikuti oleh Kerajaan Sriwijaya (abad ke 7-11), sebagai kerajaan yang jaya dari zaman Hindu-Budha. Kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Melayu Melaka (abad ke 14-16) yang dipandang sebagai lambang kerajaan Melayu dan pusat penyebaran agama Islam di kawasan Nusantara. Setelah itu diikuti oleh sejumlah kerajaan-kerajaan Melayu lainnya seperti: Kerajaan Deli, Langkat, Riau-Lingga, Johor-Pahang, Siak Sri Indrapura,

Indragiri, Brunai Darussalam, dan lain-lain. Kawasannya meliputi Pulau Sumatera dan sebagian besar belahan timur, semenanjung Melaka, Kalimantan belahan utara dan barat, kemudian daerah kepulauan Selat Melaka dan Kepulauan Riau.

Menurut sejarahnya, nenek moyang orang Melayu berasal dari berbagai suku Adiva yang menyebutkan dari Suku Dravida di India, dan Mongolia atau camurutan Dravida dengan Arya yang kemudian kawin dengan ras Mongolia. Kedatangan mereka ke Nusantara terjadi dalam dua gelombang. Gelombang pertama diperkirakan antara 3000 sampai 2500 tahun sebelum masehi, gelombang ini disebut Proto Melayu atau Melayu Tua. Orang yang tergolong Melayu tua khususnya di Riau antara lain, Suku Talang Mamak, Suku Sakai, Suku Laut, Suku Petalangan, Suku Hutan, dan lain-lain. Gelombang kedua terjadi sekitar 300 sampai 250 tahun sebelum masehi, yang disebut Deutro Melayu atau Melayu Muda. Gelombang yang terakhir inilah tampaknya yang paling besar, paling dominan dan yang berkembang dalam masyarakat Melayu (Herliand, 2000 : 1).

Pada prinsipnya kedua Melayu (Melayu Tua dan Melayu Muda) memiliki persamaan budaya yakni menunjukkan budaya perairan (maritim), oleh karena itu mereka adalah ‘manusia perairan’ bukan manusia pegunungan. Sebab, mereka menyukai air, laut, selat, dan suka mendiami daerah-daerah aliran sungai. Sehingga budaya mereka selalu berkaitan dengan air dan laut, seperti sampian, rakit, perahu, jalur, titian, berenang dan bermacam perkakas perikanan seperti jaring, jala dan kail.

Akan di bidang kemasyarakatan keturunan Melayu Tua terkesan tradisional, karena mereka sangat memegang adat dan tradisinya. Mereka sangat kendali adat seperti Patih, Batin dan Datuk Kaya, mereka sangat peduli perannya dalam mengatur lalu lintas kehidupan. Alam pikiran dan kehidupan mereka masih sederhana, karena ditentukan oleh faktor alam, alam ini menyebabkan munculnya tokoh tradisi seperti dukun, *bomoh*, dan *kemantan*. Para tokoh ini dapat membuat hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Mereka percaya bahwa laut, tanjung, gunung, pohon, ikan, burung, binatang liar lainnya dihuni atau dikontrol oleh makhluk halus, yang kemampuannya melebihi kemampuan manusia. Makhluk halus yang menunggu tanah disebut *jembalang*, makhluk halus yang mengawal binatang liar dan burung disebut *sikodi*, sedangkan makhluk halus yang memampakkan dirinya sebagai perempuan cantik disebut *peri*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seiring dengan perkembangan waktu, Melayu Muda lebih berkembang dibandingkan dengan Melayu Tua. Mereka datang sekitar 300-250 tahun sebelum masehi, Melayu Muda inilah yang berkembang saat ini, yang kemudian mendirikan kerajaan Melayu, mulai dari kerajaan Melayu yang masih menganut agama Hindu-Budha seperti Sriwijaya (abad ke 7-11) diikuti oleh kerajaan Melayu Islam seperti Melaka, Johor-Pahang, Riau-Lingga, Siak Sri Indrapura, Pelalawan dan sebagainya. Keturunan Melayu Muda ini telah memeluk agama Islam sejak Raja Melaka Parameswara yang dikenal dengan Sultan Muhammad Iskandar Syah yang masuk Islam pada tahun 1414 M. Dari sejumlah kerajaan Melayu Riau yang berkembang saat itu, ada beberapa diantaranya yang mencatat sejarah dalam kejayaan yang hingga kini budayanya telah diwarisi oleh generasi penerus masyarakat Melayu Riau.

1. Kejayaan Masyarakat Melayu Riau Tempo Dulu

Awal kejayaan masyarakat Melayu di Riau ditandai dengan kekuasaan raja-raja yang berkembang antara abad 16 hingga 18. Salah seorang raja yang dikenal dengan Raja Kecil yang memerintah pada pertengahan abad 16 merupakan salah seorang keturunan Sultan Johor yaitu putera Sultan Machmud Iskandar Syah atau dengan gelar Al Mahrum Machmud (wafat pada 1719 M. Siapakah Raja Kecil, memerlukan uraian tersendiri mengenai berbagai versi dari sumber-sumber yang ada memberikan informasi yang berbeda. Benarkah Raja Kecil putera Sultan Machmud Iskandar Syah? Terlepas dari siapa sebenarnya Raja kecil, dari sumber-sumber yang ada Raja Kecil pernah dibesarkan dan dididik di Minangkabau dan dewasa Raja Kecil dapat menghimpun kekuatan di Pantai Timur Sumatera dari berbagai suku bangsa.

Setelah wafatnya Raja Kecil terjadi perpecahan diantara kesultanan Kesatuan kedaulatan dan wilayah kesultanan Melayu terpecah menjadi pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah di Johor dan pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura di Buatan (Riau). Kini Siak adalah salah satu kabupaten baru di Provinsi Riau yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Bengkalis. Jarak Siak Sri Indrapura (sebagai ibu kota kabupaten) sekitar 65 Km dari Pekanbaru. Wilayah Siak



terletak di tepi sungai Siak dan termasuk daerah yang menempati pesisir timur Sumatera. Secara historis Siak merupakan salah satu pusat kerajaan Islam yang berada di bawah imperium Melaka (Luthfi, 1991 : 131).

Kesultanan Siak memiliki Istana Kerajaan, Mesjid Kerajaan, dan Balai Kerapatan Tinggi. Pada saat memerintah ketiga institusi ini berfungsi mengatur tata kehidupan masyarakat. Istana merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan politik, mesjid merupakan pusat kegiatan keagamaan dan spiritual, dan Balai Kerapatan merupakan pusat tempat pertemuan untuk membahas hal-hal yang bersangkutan dengan adat dan kehidupan sosial masyarakat, dan juga difungsikan sebagai tempat pengadilan.

Kesultanan Siak diperintah oleh seorang Sultan sebagai pemegang puncak pemerintahan tertinggi dan didampingi oleh dewan kerajaan. Dewan kerajaan terdiri dari orang-orang besar yang berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dan penasihat utama Sultan. Orang-orang besar itu diantaranya Datuk Empat (empat) suku yaitu Datuk Lima Puluh gelar Sri Berjuangsa, Datuk Tanah Datar gelar Sri Pekerma Raja, Datuk Pesisir dengan gelar Maharaja Kerangsang dan Datuk Laksamana Raja Di Laut.

Didampingi dua kekuasaan tersebut (Siak dan Johor) tumbuh pula pemerintahan kerajaan-kerajaan lain di dalam dan di luar wilayah kekuasaan tersebut. Di wilayah Siak tumbuh kerajaan Pelalawan dan Rokan. Kedua kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan yang berdaulat. Kerajaan Pelalawan tumbuh dan berkembang dengan pemerintahan Raja dengan gelar Maharaja Dinda dan yang terakhir Assyaidis Syarif Abu durrahman Fachruddin Tengku Besar Raja Kerajaan Pelalawan (1866-1886).

Selain itu, di luar wilayah Kesultanan Siak dan Johor tumbuh pula kerajaan Indragiri (1658-1838). Wilayah kerajaan ini meliputi perairan dari mangrove Indragiri sampai perbatasan Cerenti di Kuantan. Pada periode ini Kerajaan Indragiri mengalami kemajuan di semua dimensi kehidupan (ekonomi, sosial dan budaya). Indragiri pada masa itu sebagai kerajaan yang modern, tetapi pernah pula menjadi wilayah penguasaan kolonial Belanda. Pada masanya kesultanan, sebanyak 22 orang Sultan Indragiri mampu mengelola wilayah geografis dan administrasi pemerintahan selama lebih kurang 437 tahun (1508-1945).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Wilayah kekuasaan kerajaan ini dari timur di sepanjang Selat Malaka sampai barat berbatasan dengan Provinsi Jambi dan utara dengan Kabupaten Kampar. Dengan wilayah kekuasaan yang relatif luas (sekitar 27.460, 26 Km²), dengan jumlah penduduknya sekitar 450.000 jiwa (berdasarkan statistik pada tahun 1945). Pada 437 tahun yang lalu tentu tidak dapat diitung secara absolut, tetapi tentu tidak lebih 100 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan besarnya kewibawaan dan kedaulatan pemegang pemerintahan, yaitu sang raja atau sultan.

Kemampuan para pemegang kedaulatan dan kekuasaan itu menunjukkan pula prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Prestasi itu ditandai dengan tidak adanya bukti-bukti tentang usaha-usaha rakyatnya memberontak kepada raja dan sultan. Dengan demikian Indragiri merupakan satu wilayah kesultanan yang bersatu, terintegrasi, dan rakyatnya semanisama mematuhi sultannya. Berhasilnya Kesultanan Indragiri melaksanakan pemerintahan dan menguasai wilayah yang luas itu berkat adanya Undang-undang kerajaan yang telah dikeluarkan oleh Nara Singa dan dimodifikasi serta disempurnakan pada masa Sultan Hasan Salahuddin (1735-1765). Undang-undang itu terdiri atas UU Adat Kerajaan dan Peradilan (Suwardi MS, 2008: 219-222).

Berdasarkan sejarahnya Kesultanan Melayu Riau yang semula sebagai kesatuan berkembang menjadi beberapa kerajaan dimana satu dengan lainnya mempunyai kedaulatan sendiri (ciri-ciri sendiri). Tetapi mempunyai hubungan dengan pusat pemerintahan Kesultanan Melayu yang berasal dari Indragiri. Seiring dengan perkembangan zaman, maka Kesultanan Indragiri runtuh sebagai kerajaan pada 1945, demikian juga kerajaan Siak dan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya runtuh karena ditekan penjajah (Belanda) pada waktu itu. Awal tahun 1911 masyarakat Melayu tercerai-berai, mereka tunduk kepada penjajah dan memilih pergi. Dua tahun kemudian penjajah menghapus Kerajaan Riau Lingga dari segala urusan administrasi pemerintahannya. Sejak itu kerajaan Melayu pun putus perkembangannya. Pada satu harian nasional mengungkapkan bahwa kejayaan masyarakat Melayu Riau kini telah runtuh, yang ada hanyalah bangunan-bangunan seperti di Siak Sri Indrapura, sedangkan sisa-sisa bangunan dan benda-benda perhiasan puncak kejayaan budaya Melayu kini terdapat di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Penginggalan budaya berupa bangunan bersejarah dan kitab-kitab manuskrip kuno yang berasal dari masa keemasan Kerajaan Riau Lingga banyak yang rusak karena kurang terurus.

1.3 Filosofi Kehidupan Orang Melayu

Sering dengan perkembangan zaman dan melalui proses waktu yang panjang masyarakat Melayu-pun mengalami berbagai perubahan di berbagai aspek kehidupan. Dalam rentang waktu yang panjang itulah terjadi pergantian generasi, namun disini yang lebih penting bukan saja pergantian batang tubuh keturunan, melainkan proses pembentukan dan penemuan nilai-nilai untuk kehidupan. Dalam perjalanan sejarahnya telah terbentuk dan ditemukan berbagai nilai yang kemudian diterima sebagai pedoman dan filosofi kehidupan orang Melayu. Dengan pedoman berbagai nilai tersebut setiap suku atau komunitas membentuk tradisi kehidupannya. Tradisi kehidupan itu biasanya terbentuk setelah nilai-nilai itu diteruskan dan dipelihara dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang tak terhingga.

Berahannya tradisi kehidupan suatu masyarakat dikarenakan adanya jatuhnya dalam berbagai peristiwa penting yang ditandai dengan upacara atau prosesi yang memuat sejumlah nilai. Namun diantaranya yang penting untuk prosesi suku bangsa tersebut adalah muatan nilai-nilai agama, adat resam atau kebiasaan. Dengan cara menghargai, memelihara dan mencerahkan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu perlu dipelihara, karena disamping untuk pedoman kehidupan, juga menjadi identitas dan untuk membentuk harga diri yang semangat persatuan.

Orang Melayu yang merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia memiliki jumlah penduduknya yang cukup besar, wilayah penyebarannya yang luas dan mereka hidup dalam kelompok-kelompok hampir di seluruh kepulauan Nusantara dan bahkan meluas sampai di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat Melayu mempunyai semangat yang kuat untuk mempertahankan identitasnya. Bagi masyarakat Melayu Riau untuk mempertahankan identitas tersebut diperlukan adanya adat. Menurut (Borhan, 2003:3) Adat yang merupakan pedoman bagi masyarakat Melayu Riau dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, adalah suatu konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup orang Melayu. Masyarakat Melayu mengatur kehidupan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merdeka dengan adat, agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memeringah dan lain sebagainya

Selanjutnya dikatakannya bahwa”dari sudut lain adat juga merumuskan struktur yang menghubungkan seluruh kehidupan manusia Melayu, yang menegaskan sifat, diri, kepribadian, identitas atau jati diri manusia, masyarakat dan budaya Melayu. Adat adalah jati diri yang menyatupadukan, menyimpulkan dan mengikat hubungan seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu kedudukan seseorang bukan ditentukan oleh keturunan (bangsa), kekepercayaan, kealiman, gaya hidup, ketinggian ilmu pengetahuan, tetapi ditentukan oleh perilaku yang “beradat” yang tercermin dalam sikap, tindakan, bertutur kata, beretika dan lain-lainnya yang telah ditetapkan oleh adat Melayu.

Adat yang merupakan pedoman dan mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu tersebut meliputi antara lain, sistem keluarga dan sistem kekerabatan. Berkaitan dengan adat ini masyarakat Melayu mengenal adanya tingkatan adat, tingkatan adat tersebut adalah “adat sebenar adat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat,” sedangkan dari nilai dapat kita di klasifikasikan mengenai norma, hukum, dan ketentuan khusus.

Dalam masyarakat Melayu Riau, adat sebenar adat merupakan aturan-aturan yang diturunkan dan berpedoman pada ajaran Islam (Al-Quaran dan Sunnah). Pernyataan tersebut mengasumsikan bahwa agama Islam mempunyai pengaruh yang besar dalam adat istiadat Melayu. Berdasarkan fungsinya adat sebenar adat merupakan pegangan hidup orang Melayu yang berpegang pada Al-Quran, Hadits, dan Fiqh. Oleh karena itu, adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan orang Melayu baik politik, ekonomi, sosial, etika dan budaya harus sesuai dan tidak bertentangan dengan sumber-sumber ajaran Islam.

Dengan demikian adat sebenar adat merupakan norma yang memiliki kekuatan yang kuat bagi masyarakat Melayu, karena bagi yang melanggar adatnya dipandang sebagai orang yang tidak beradat, tetapi juga dianggap sebagai orang yang kurang beragama. Biasanya hal-hal yang dipertahankan dalam adat sebenar adat adalah, hal-hal yang sifatnya universal, yang sudah jelas dan sudah diatur oleh agama, sementara hal-hal kecil dan masih diperselisihkan akan muncul perbedaan-perbedaan pemahaman akan ada toleransinya. Adat sebenar adat diberi batasan sebagai sesuatu yang seharusnya menurut alur



dan adat, baik menurut agama, menurut peri kemanusiaan, maupun menurut tempat dan waktu (Luthfi, 1991 : 109)

Tingkatan adat setelah adat sebenar adat adalah, adat yang diadatkan, menurut Ghalib (dalam Budisusanto 1985 : 500) adat yang diadatkan merupakan adat yang dibuat oleh penguasa pada kurun waktu tertentu, dan adatu itu harus berlaku jika tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Adat ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman dan situasi. Dengan demikian adat yang diadatkan dapat disamakan dengan ‘peraturan pelaksanaan’ dari sesuatu ketentuan adat. Adat yang diadatkan ini dibuat berdasarkan mufakat dan musyawarah, tetapi ia tetap tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari ketentuan adat sebenar adat. Adat yang diadatkan akan berubah jika tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan perkembangan pandangan dari pihak penguasa seperti kata pepatah “sekali air bah, sekali tepian beralih”. Namun sebenarnya adat yang diadatkan ini mengandung makna ketentuan yang berisi suruhan dan larangan atau pantangan di dalam masyarakat itu sendiri. Ketentuan-ketentuan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ketentuan yang turun dari raja, Adat yang datang dari datuk, Adat yang cucur dari penghulu dan Adat yang dibuat oleh masyarakat.

Makna yang dikandung dalam ketentuan adat yang diadatkan memiliki nilai yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat tertentu, yang selalu bersentuhan dengan tingkah laku seseorang dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, mulai dari keluarga, hampai lingkungan masyarakat secara luas. Ketentuan yang diatur oleh adat yang diadatkan diakui oleh setiap individu dalam suatu komunitas-komunitas karena itu adat sebenar adat inilah yang paling awal memasuki kehidupannya.

Menurut sejarah masyarakat Melayu Riau, adat yang diadatkan pada awalnya mengatur hak-hak istimewa para penguasa (raja), para bangsawan dan orang-orang yang memiliki kedudukan seperti keturunan Tengku, Wan, Datuk, Syarif, Said, namun seiring dengan perkembangan zaman adat yang diadatkan ini juga mengatur masyarakat kebanyakan (orang awam). Peraturan ini meliputi bentuk rumah, bentuk dan warna pakaian, serabut-atribut yang digunakan dalam upacara, baik dalam perkawinan, kelahiran, maupun dalam kegiatan ekonomi.





Dalam sebuah pertemuan dengan beberapa tokoh budaya Melayu mengatakan bahwa: “Dalam masyarakat Riau ketentuan adat dan nilai-nilai yang mengatur pola kehidupan mereka tidak terlepas dari latar belakang budaya yang berasal dari kerajaan Melayu yang berkembang saat itu. Dimana secara sosio-kultural historis mempunyai karakteristik tersendiri, hal ini dapat dilihat dari kemajemukan masyarakatnya, yang berkaitan dengan pusat-pusat kerajaan lokal seperti Bintan, Kampar, Indragiri, Siak, Pelalawan, Rokan dan sebagainya. Kerajaan ini berada dalam satu kekuasaan yang dikenal dengan Kerajaan Melayu.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri masyarakat Melayu Riau memiliki adat-istiadat. Adat istiadat yang mereka anut berpedoman dan berdasarkan ajaran agama Islam, dan memiliki nilai-nilai normatif yang berakar dari filosofi, “Adat bersendi syarak, Syarak bersendi kitabullah.” Filosofi ini melahirkan “adat sebenar adat.” Selanjutnya dikenal ungkapan “Syarak mengata, Adat memanaka.” Artinya, bila adat salah harus kembali ke syarak

Orang Melayu berpandangan, “Biar mati anak asal tidak mati ada.” Adat tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Akan tetapi ada ungkapan, “Sekali air bah sekali tepian berubah”. Artinya adat yang sudah ada itu boleh disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penerapan adat ini mengandung nilai-nilai budaya, artinya didalam menjalankan adat Melayu disini maksudnya berupaya melaksanakan nilai, ukuran baik dan buruk, sesuai dengan ide, pokok pikiran, dan gagasan dalam adat Melayu. Nilai-nilai budaya Melayu yang dideskripsikan menyangkut berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Nilai politik ialah ukuran baik atau buruk yang terkandung dalam budaya. Ukuran baik bahwa kekuasaan dapat diangkat dari ungkapan Hang Tuah sakti hamba negeri, Esa hilang dua terbilang, Patah tumbuh berganti, Takkan Melayu hilang di bumi”,”Raja adil raja disembah, Raja tidak adil raja disinggah”; dan “Bulat air karena pembuluh, Bulat kata karena

Nilai ekonomi ialah bahwa potensi alam merupakan sumber ekonomi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat sebagaimana tertera dalam ungkapan, “Ke buatan berbunga kayu, Ke laut berbunga pasir, ke sawah

berbina emping”. Segala pendapatan sama dibagi secara benar yang terungkap dalam pepatah, “Hati tungau sama dicecah, Hati gajah sama dilapah”.

Nilai sosial ialah ukuran baik untuk hidup bersama dan bekerja sama yang ditunjukkan oleh kegiatan betobo dan bersolang. Kegiatan ini sudah dibicarakan dalam masyarakat. Sistem hidup kekerabatan menurut adat dan resam menjadi pegangan utama yang terdapat dalam ungkapan, “Berat sama dipikul, Ringan sama dijijing dan Ke bukit sama mendaki ke lurah sama menuruni. Artinya hidup bersuku-suku, berkelompok-kelompok, tidak individual, tidak nafsi-nafsian. Nilai kebersamaan itu dalam pepatah Melayu seperti pada ungkapan, “Setikar sebantal tidur, Sepiring sepinggan makan, Seatak tekemenakan, Senenek dan semamak, Seadat dan sepusaka, dan Makan tidak menghabiskan, Minum tidak mengeringkan.”

Nilai budaya ialah ide, gagasan, prinsip pokok sebagai ukuran baik dan sebaliknya menjadi ukuran buruk. Budaya Melayu menganut ukuran baik, berpegang pada harkat dan martabat, adil, jujur, berani, toleran, demokratis, sopan dan santun, dan sebagainya. Nilai-nilai itu sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang orang Melayu, sehingga masyarakat Melayu senantiasa selalu mempedomaninya dalam kehidupannya, kecuali bila tidak dibekali oleh generasi pendahulunya.

Sistem budaya Melayu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berpengaruh generasi penerus masyarakat Melayu Riau tetap memiliki ukuran baik dan buruk sesuai dengan gagasan dasar Melayu, sehingga mereka terdapat unsur negatif. Mengingat berbagai unsur budaya lain yang masuk, mereka menantang dan mempengaruhi generasi Melayu tersebut. Untuk itu perlu dibentengi dengan nilai-nilai budaya nenek moyangnya yang mampu mengantar generasinya beradaptasi dengan perkembangan mereka senantiasa tetap menjadi manusia beradab dan setara dengan manusia lain di dunia.

Potensi Kebudayaan Melayu di Riau

Riau mengalami perkembangan yang pesat, dimana hingga saat ini mereka mendiami hampir di seluruh Nusantera. Pada mulanya sebagai “anak Riau” mereka memiliki persamaan dalam bahasa, adat resam Melayu





dan agama Islam. Namun akhir-akhir ini menurut Yusuf (1996 : 62-70), komunitas yang tetap kukuh menyebut diri mereka sebagai orang Melayu adalah masyarakat Melayu Riau. Sedangkan suku Melayu lainnya, kata Melayu sudah mengalami distorsi, seperti masyarakat (Melayu) Betawi di Jakarta, (Melayu) Minangkabau, (Melayu) Jambi, (Melayu) Palembang, mereka lebih suka disebut orang Betawi, orang Jambi, Orang Minang, dan orang Palembang tanpa embel-embel Melayu

Sejarah perkembangan kebudayaan Melayu Riau dengan berbagai umumnya diketahui berkat usaha pujangga/ penulis terkenal, yaitu Raja Ali Haji dan Raja Ahmad. Karya-karya Raja Ali Haji yang menulis berbagai bidang seperti sastra, bahasa, sejarah, agama, dan sebagainya. Kenyataan ini memberikan petunjuk tentang kondisi dan potensi serta eksistensi kebudayaan Melayu Riau. Salah satu potensi budaya yang ditulis dalam sejarah Melayu Riau tersebut adalah adanya adat yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur kehidupan orang Melayu, meliputi antara lain sistem kekeluargaan (pemberian gelar keturunan, upacara perkawinan, khitanan, pembagian warisan dan lain sebagainya), sistem kerabatan (pemberian gelar kehormatan, upacara-upacara keagamaan, upacara adat dan lain sebagainya) dan tradisi/kebiasaan daerah (acara-acara keagamaan) mengandung nilai-nilai yang berakar dari nilai Islam, yang berlangsung ribuan tahun membentengi anggota masyarakatnya.

Dengan demikian bagi masyarakat Melayu di Riau, adat memiliki peran penting dan berfungsi sebagai wadah penyambung jati diri atau identitas masyarakat. Sesuai dengan pepatah Melayu “di mana bumi di pijak di situ di junjung.” Pepatah ini selalu didengungkan dalam berbagai kesempatan di bumi Lancang Kuning (Riau), hal ini disebabkan adanya kekhawatiran dengan kelestarian budaya Melayu di tengah ancaman budaya luar. Memang diakui budaya Melayu masih terlihat kental diantusias masyarakat di pedesaan, namun di kawasan perkotaan, budaya Melayu sangat terancam.

Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Melayu di Kota Pekanbaru beberapa tahun yang lalu, bekerja sama dengan diselenggarakan seminar bertajuk Interaksi Kebudayaan Melayu di Masyarakat Perkotaan, yang diselenggarakan di Pekanbaru pada tanggal 25 November tahun 2006 yang lalu. Dalam seminar tersebut budayawan

sekaligus pendiri TEF, Tennes, menyebutkan bahwa, kelestarian Budaya Melayu di Kota Pekanbaru cukup mengkhawatirkan. Selanjutnya dia mengatakan bahwa untuk melestarikan budaya Melayu, maka harus dijelaskan dulu “tanda” atau “Identitas Melayu” itu sendiri. “Seperti Aceh, Jogjakarta, Minang dan Bali, begitu kuat budayanya karena tanda,” katanya. Sedangkan Walikota Pekanbaru Herman Abdullah saat itu, mengatakan dalam salah satu harian di ibu kota ini bahwa, “.....selalu menginginkan agar nilai-nilai kebudayaan Melayu terus mewarnai perkembangan kebudayaan di Kota Pekanbaru. Jangan sampai Budaya Melayu tergusur oleh nilai-nilai budaya lokal lainnya, maupun budaya asing yang memang jauh dari akar kebudayaan Melayu yang kita kembangkan.”

Pendapat lain dikemukakan oleh salah seorang birokrat Chaidir (mantan Ketua DPRD Provinsi Riau) mengatakan bahwa, “.....untuk melestarikan budaya Melayu ini di bumi Riau, setiap produk politik yang dihasilkan untuk berbagai bidang hukum, ekonomi, sosial, dan pembangunan, haruslah bertitik tolak pada budaya Melayu.” Terkait dengan pelaksanaan acara yang diinisiasikan pemerintah Kota dan TEF tersebut, Ketua TEF, Burhanuddin menegaskan masyarakat perkotaan berbilang kaum. Dan Melayu diharapkan bisa menjadi warna dan perekat budaya internal.

Berdasarkan kondisi inilah penulis berasumsi perlunya merevitalisasi, memulihkan atau mempraksiskan kembali budaya yang dulunya menjadi bagian masyarakat, menjadi budaya yang benar-benar merupakan pedoman bagi masyarakat Melayu Riau dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kondisi ini mendapat perhatian yang serius bagi pendukungnya dapat berakibat melestarikan identitas sebagai orang Melayu. Kondisi ini mungkin akan berlanjut ke masa depan jika tidak ada perubahan strategi yang berorientasi pada kebudayaan. Oleh karena itu, visi Riau yang dikukuhkan dalam Perda No. 12 tahun 2001 supaya Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera dan Aman Batin di Asia Tenggara Tahun 2020 dapat terealisasi.

Salah kebijakan dalam kebudayaan yang perlu diperhatikan antara lain meningkatkan penggalan, pengkajian, dan memutakhirkan kebudayaan Melayu secara terpadu dan berkesinambungan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran berbudaya Melayu dalam upaya menangkal budaya luar (asing) yang negatif. Dalam tulisan ini penulis berupaya mengungkapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



penggalian khasanah budaya Melayu yang bertujuan untuk memelihara dan memertarikan kebudayaan tersebut, selanjutnya menetapkan pembangunan kebudayaan lokal.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Melayu ini tentu saja tidak terlepas dari mana asal mereka (karena ada yang keturunan Melayu pesisir dan Melayu daratan). Mereka memiliki perbedaan dalam sistem kekeluargaan, kekerabatan dan sistem perekonomian. Kondisi ini akan mempengaruhi adat istiadat mereka dan cara-cara mereka melakukan penggalian budaya tersebut yang bertujuan untuk merevitalisasi identitasnya, yang dipaparkan dalam peta internal budaya berikut ini.

1. Peta Internal Budaya Melayu Riau dalam Revitalisasi Identitas

Telah disinggung sebelumnya bahwa masyarakat Melayu dalam tulisan ini adalah masyarakat yang berasal dari subetnis yang mengatas-namakan sebagai (lembaga pemerintah dan budaya), dalam konteks kekinian tengah berusaha untuk merumuskan dan “menghidupkannya” kembali identitas mereka berdasarkan *basic identity*-nya. Proses ini dapat dikatakan sebagai revitalisasi identitas. Kondisi ini terjadi dikarenakan masyarakat Melayu Riau merasa gelisah akan kehilangan identitas mereka di tengah gerusan gelombang modernisasi dan modernisasi yang semakin luas, bukan saja di Indonesia, juga di berbagai daerah, terutama di Provinsi Riau. Faktor politik dan ekonomi, selain tentu saja psikologi, sangat berperan dalam mendorong dan membentuk proses-proses revitalisasi ini.

Persepsi tentang semangat revitalisasi identitas yang digawangi oleh elemen ini, pada akhirnya munculah karena mereka melihat rendahnya kesadaran yang ada di masyarakat perihal eksistensi budaya Melayu. Kondisi ini tentu saja menimbulkan membahayakan masyarakat dan kebudayaan itu sendiri jika tersentuh oleh ancaman budaya asing dan globalisasi. Kemudian globalisasi dianggap sebagai ancaman yang paling penting dan lebih *urgent* dibanding sekedar intervensi kebudayaan asing. Karena, jika pada ‘kebudayaan asing’ sumber ancaman itu dapat diidentifikasi, sementara pada ‘globalisasi’ sulit untuk diidentifikasi. Globalisasi bisa datang dari mana saja, dan tidak selalu dapat dikaitkan dengan negara tertentu sebagai mana halnya ‘kebudayaan asing’.

Berkaitan dengan ancaman yang akan terjadi terhadap kebudayaan

Melayu, dikemukakan salah seorang tokoh budaya Riau Fakhrunas MA Jabar mengatakan bahwa, “Nilai-nilai budaya Melayu yang ada hingga hari ini merupakan pewarisan nilai-nilai lama, masih tersisa dari pola hidup masyarakat pengguna budaya Melayu, yang kini semakin tergerus oleh peradaban baru. Kehidupan yang multikultural membuat kebudayaan Melayu semakin terjepit oleh nilai-nilai budaya lain yang terus berebutan masuk ke ranah budaya Melayu yang ada di bumi Riau ini. Akulturasi budaya ini tidak bisa dihindari sejalan dengan proses migrasi masyarakat dan komunitas yang tak bisa dilihat dari karena tuntutan kehidupan yang nyata dan kompleks.”

Dengan demikian revitalisasi identitas diperlukan selain untuk eksistensi identitas dan kebudayaan itu sendiri, juga untuk membangun integrasi masyarakat Melayu Riau demi menghadapi ancaman tersebut. Integrasi ini dibanggakan melalui berbagai macam negosiasi dan konsolidasi antar masing-masing subbudaya ataupun antara fungsi kebudayaan dengan konteks waktu yang mana terjadi dalam proses revitalisasi tersebut.

Proses revitalisasi ini merupakan refleksi kritis atas pandangan Melayu Esensialis (istilah dari Heddy Sri Ahimsa Putra, 2007). Perspektif ini beranggapan bahwa kemelayuan merupakan sejumlah ciri-ciri yang dapat ditemukan pada unsur-unsur kehidupan masyarakat dan budaya Melayu. Akan tetapi, Melayu Esensialis ini harus juga diikuti oleh perspektif Melayu Kontekstual untuk mencapai apa yang disebut revitalisasi dan lebih jauh lagi untuk mencapai tujuan dari revitalisasi ini. Pandangan kontekstual mengatakan bahwa memahami kemelayuan sebaiknya dilakukan dengan menempatkan budaya Melayu dalam relasi dengan budaya-budaya lain yang ada di Riau atau dengan budaya Indonesia (Putra, 2007: xi).

Dalam tulisan ini pandangan Melayu Kontekstual dipersempit lagi ruang lingkupnya. Pemahaman dilakukan terhadap Melayu Riau, dengan menempatkan budaya dalam relasi-relasi dengan subbudaya yang ada di Riau. Hal ini dapat dilihat dari Melayu yang ada di Riau ternyata memiliki berbagai macam subbudaya yang disebut subbudaya yang berbeda-beda. Jadi, kedua pandangan atas adalah pandangan yang membingkai gerak langkah revitalisasi yang dilakukan segenap elemen masyarakat Melayu Riau. Untuk lebih jelasnya bagaimana subbudaya dalam kebudayaan Melayu Riau dipaparkan berikut ini.





1. *Puak Melayu di Riau*

Sekitar abad 16-18, Provinsi Riau didiami oleh orang Melayu yang berasal dari beberapa daerah dengan pemerintahan dan kekuasaannya sendiri (baik yang berbentuk Kesultanan maupun Kerajaan), yang dahulu pernah berdiri di wilayah itu dan menjadi bagian dari Kesultanan Melayu. Di antaranya adalah kerajaan Inderagiri (1658-1838), Kerajaan Siak (1723-1855) Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan banyak lagi kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Ramban, Kampar, dan Kandis (Rantau Kuantan) (UU No 61 tahun 1958). Setiap orang berdasarkan keturunan masing-masing daerah ini kemudian membentuk semacam kesatuan yang disebut *puak*. Empat *puak* besar yang mendominasi Riau hingga saat ini yaitu, Siak, Indragiri, Kampar, dan Pelalawan.

Jika ditarik jauh kebelakang berbagai perubahan entitas dan identitas yang terjadi dalam kemelayuan Riau, perlu diperhatikan aspek kesejarahan Melayu di Riau yang nantinya mempunyai peran besar dalam proses akulturasi seperti telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan sejarahnya Riau dibagi menjadi beberapa periode besar berdasarkan perkembangan politik. Satu, masa prasejarah, dua, masa ketika Riau berada dalam lingkup kemelayuan di bawah hegemoni Sriwijaya. Tiga, masa ketika kemelayuan Riau merupakan bagian yang integral dengan dunia kemelayuan di Tanah Semenanjung. Keempat, ketika dunia Melayu Riau terdiri dari berbagai entitas yang terpisah-pisah yang hanya terkonsentrasi di sepanjang pantai Sumatera dan terpisah dari tanah Semenanjung. Lima, masa ketika kemelayuan Riau mencoba bertahan di bawah hegemoni kolonial Belanda. Terakhir, masa ketika Riau seperti wilayah lain yang sebelumnya merupakan kolonial Belanda terintegrasi ke dalam kesatuan keindonesiaan pada proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan berdiri sendiri sebagai sebuah propinsi (Pusat Studi Kebudayaan, 2009: IV.1).

Pada periode pertama wilayah Riau tidak dapat dipisahkan dari Asia Tenggara. Pada periode kedua dan ketiga, Riau merupakan satu kesatuan kesatuan budaya yang tidak terpengaruh oleh batas-batas geografis. Pada periode ini pengaruh agama Hindu-Budha serta Islam dikenal dan berkembang di wilayah ini. Pada periode keempat dan kelima, ketika pengaruh imperialisme dan kolonialisme barat, selain muncul monopoli perdagangan juga terjadi perebutan wilayah oleh Negara lain, baik Belanda, Inggris,

maupun Jepang, dan yang terakhir, yaitu pada periode pembentukan dan pengembangan wilayah yang multikultural, ketika wilayah Riau mengelola sumber dayanya untuk pengembangan wilayahnya (PSK, 2009: IV.2).

Periode yang berbeda-beda ini meninggalkan budaya yang beragam pula yang diterima oleh masyarakat Riau pada masa itu dan bercampur dengan kebudayaan asli untuk kemudian menghasilkan budaya baru yang juga berbeda. Misalnya, bukti-bukti sejarah menunjukkan adanya jalinan kerjasama selama beberapa waktu antara kerajaan-kerajaan di Riau dengan pemerintahan Hindia Belanda, terutama Kerajaan Siak Sri Indrapura yang kelak menurunkan orang-orang yang tergabung dalam puak Siak. Kerajaan Siak pada awal abad 19 misalnya, telah menjalin hubungan perdagangan dan politik yang dekat dengan Negara-negara Eropa, Persia, hingga Asia Tengah. Sedemikian akrab hingga konon Ratu Wilhelmina sendiri pernah berkunjung ke Istana Siak. Di bekas istana Kerajaan Siak saat ini tersimpan aneka barang yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Tidak dipungkiri, kerjasama tersebut pastilah menimbulkan beberapa akulturasi kebudayaan yang membedakan Siak dengan puak lain.

Jika ditarik lebih jauh lagi ke belakang, ketika Islam datang ke Nusantara, Melayu dengan cepat menerimanya dan kemudian menjadikan Islam sebagai pedoman. Bukti arkeologis seperti makam-makam kuno bertuliskan huruf Arab dan naskah-naskah atau hikayat raja-raja Melayu juga menunjukkan adanya hubungan antara Islam dan Melayu.

Pada tahun 173 H (800 M) sebuah angkatan dakwah di bawah pimpinan Daud al-Qadiri mendarat di Bandar Perlak (Aceh Timur sekarang). Daud al-Qadiri adalah seorang ulama yang berkecenderungan ke arah Sufisme. Dengan segera Meurah Perlak dan rakyat-rakyatnya pun memeluk Islam (Hasjmy: 2007:275). Sejak saat itu, segala segi kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, keilmuan, kebudayaan dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam. Membicarakan Melayu berarti juga membicarakan Islam. Adat Melayu kemudian dirujuk ke hukum-hukum Islam yang sesuai dengan ungkapan Adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah.

Di antara itu, awal kontak Riau dengan dunia luar, yaitu pengaruh Hindu dan Budha, maka akan ditemukan sisa-sisa pengaruh mereka dalam tradisi lisan dan kesenian, salah satunya adalah dalam Legenda Celempong





Tiba Terhenti. Dalam legenda tersebut diceritakan bahwa Muara Takus, yang terletak di tepian sungai Kampar Kanan, adalah pusat pemerintahan pra-Islam (PSK, 2009: IV.30). beberapa kerajaan yang ada di Propinsi Riau pada masa pengaruh Hindhu-Budha antara lain, Kerajaan Kerintang, Kerajaan Kemuning, dan Kerajaan Batin Enam Suku (PSK, 2009: IV.33). Keturunan dari kerajaan-kerajaan pra Islam ini pastilah memiliki beberapa unsur atau simbol budaya yang berbeda dengan yang lainnya. Walaupun tetap berbaaur dengan budaya-budaya yang lebih kontemporer.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa saat ini Riau memiliki empat buak yang dibedakan berdasarkan keturunan secara historis (kerajaan/ Kesultanan) yang kemudian menyebabkan perbedaan adat istiadat dan budayakemelayuannya. Perbedaan yang paling signifikan adalah adanya 2 (dua) sistem kekerabatan di bumi Melayu ini, dimana penduduk Riau yang hidup di daerah pesisir (sebagai pelaut/nelayan) memiliki sistem kekerabatan patrilineal. Kaitan keluarga didasarkan pada pihak ayah sesuai dengan kepulauan dalam agama. Adat ini bersumber dari adat Tumenggung, yakni putra raja Kesultanan Melayu terdahulu yang dilahirkan dari istri yang bangsawan. Adatnya bersifat aristokrasi. Wilayahnya meliputi Indragiri, Siak, Singkil, Pelalawan, dan sebagian Rokan. Wilayah ini antara lain dicirikan dengan gelar Tengku.

Sementara itu, di daerah Riau daratan sistem kekerabatannya adalah matrilineal, yaitu menurut garis keturunan ibu dengan tradisi suku yang kuat diperuhi oleh adat Minangkabau. Menikah dengan orang yang masih satu keluarga dilarang, karena dianggap masih memiliki pertalian darah. Adat ini berdasar dari Adat Papatihan, yang diturunkan oleh anak raja dari orang datnya adalah adat demokrasi yang meliputi wilayah Kabupaten Indragiri, Kuantan Singingi, dan sebagian Rokan yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Cirinya adalah gelar datuk dan masyarakat yang bersuku-

Perbedaan sistem kekerabatan berujung pula pada perbedaan norma-norma yang berkaitan dengan keluarga. Akan tetapi sebagian ahli berpendapat (litbang Kompas) bahwa peta pembagian adat ini hanya relevan di sekitar tahun 1950. Percampuran budaya yang sudah relatif cair saat ini menyebabkan pemilahan adat tidak lagi jelas. Isu adat terangkat ke permukaan jika ada interaksi lokal atau 'kepentingan-kepentingan' tertentu yang

memerlukan legitimasinya. Kemunculan semangat revitalisasi kebudayaan yang terjadi akhir-akhir ini disinyalir juga penuh dengan ‘kepentingan’ yang disamarkan dalam cita-cita mewujudkan visi Riau 2020.

Perbedaan adat ini dikuatkan oleh keyakinan mitologi adat Riau yang terbagi dalam dua sumber, yaitu adat Tumenggung dan Papatihan. Tumenggung adalah putra raja dari istri bangsawan dan Papatihan adalah putra raja dari orang biasa. Kedua adat ini mempunyai cara dan teritorial yang berbeda. Adat Tumenggung berada di pantai-pantai timur Sumatra dan bersifat patrilineal, sedangkan adat Papatihan berada di pedalaman Sumatra dan bersifat matrilineal (Rab, 2007: 459). Jadi, daerah Kampar dalam hal ini merupakan bagian dari pedalaman Sumatera.

Untuk memahami lebih lanjut berbagai perbedaan lokalitas atau puak yang memutarbelakangi perbedaan dalam memahami revitalisasi identitas ini, tidak terlepas dari proses akulturasi budaya. Akulturasi dalam suatu wilayah ini ternyata terjadi tidak hanya karena ekspansi kebudayaan tertentu, melainkan juga faktor kedekatan geografis dan keadaan demografi. Sebagai contoh, kabupaten Kampar secara geografis berbatasan langsung dengan daerah Sumatera Barat, secara demografis, sebagian besar penduduknya berasal atau keturunan Minangkabau, sehingga kebudayaan mereka memiliki banyak persamaan dengan kebudayaan Minangkabau. Kondisi ini terlihat dalam sistem kekerabatan yang matrilineal, dan dialek bahasa yang dekat dengan bahasa Minang. Hingga saat ini, Kampar masih mempergunakan budaya matrilineal dan minangkabau.

Hal ini juga terlihat dari bahasa dan segi arsitekturnya. Rumah adat di Kampar yang bernama ‘*Lontiok*’ lebih mirip dengan rumah adat Minangkabau (rumah bagonjong) dibandingkan rumah adat Melayu Riau lainnya. Artinya, berbagai macam jenis akulturasi yang terjadi antara Melayu dengan budaya lain menciptakan berbagai ragam kecenderungan budaya Melayu.

Di Kampar yang menganut sistem matrilineal, dimana perangkat adat ditopang oleh keberadaan ninik mamak, saat ini begitu gencarnya memunculkan kembali tradisi tersebut, oleh karena peran ninik mamak yang di sana sudah mulai memudar. Hal ini disampaikan oleh mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin. Ia mengatakan sistem adat istiadat mulai





memudar berbarengan dengan sistem pemerintahan yang ada saat itu. Namun, hal ini tidak perlu terjadi kalau semua pihak sepakat untuk tetap menjaga sistem tersebut. Dia menyimpan kerisauan sekaligus keprihatinan di dalam batinnya karena ternyata masih banyak pihak yang belum menguasai tata cara prosesi penobatan ninik mamak. Acara penobatan ini perlu tata cara standar dan yang telah dibakukan sehingga dapat dikuasai oleh satu generasi ke generasi berikutnya.

Keberadaan ninik mamak sebagai perangkat adat dalam kenegerian di Kabupaten Kampar bukanlah semata-mata sebagai simbol adat melainkan mempunyai arti penting bagi masyarakat itu. Bahkan dapat dikatakan ninik mamak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Kampar. Tidak ada ninik mamak sama artinya dengan tidak adanya Kampar. Seperti dikatakan Bupati Kampar di bawah ini.

“Seorang ninik mamak dituntut untuk selalu bersikap benar, dapat dipercaya, tegas, dan berani menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ninik mamak, selain sebagai orang tua yang dituakan oleh masyarakat, diponakan juga sebagai mitra pemerintah sebagaimana pepatah kita mengatakan “*tali bapilin tigo, tigo tungku sajarangan*” dalam hal ini ninik mamak, pemerintahan, dan alim ulama harus bersatu padu dan bahu-membahu membangun negeri”

Saat ini pemerintahan Kampar juga menggunakan dukungan ninik mamak untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada anak-anak dan warga masyarakat. Mengingat pentingnya peran ninik mamak dalam pemerintahan Kampar mempunyai komitmen yang besar untuk memberikan kesejahteraan ninik mamak. Salah satunya adalah akan memisahkan rencana anggaran untuk pembuatan baju seragam ninik mamak, dengan simbol adat, serta akan mengupayakan agar insentif yang diterima ninik mamak disetarakan dengan insentif kepala desa.

Namun dukungan ninik mamak ini bukan semata-mata demi pelestarian adat dan kebudayaan kabupaten Kampar itu sendiri melainkan lebih banyak dalam memperlancar kepentingan ekonomi pemerintah. Misalnya, Kabupaten Kampar ninik mamak diberdayakan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada anak kemenakan warga masyarakat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

agar dapat merelakan lahannya yang terkena program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah antara lain dalam proyek pelebaran jalan Pekanbaru-Bengkinang.

Demikian pula rencana program pembangunan Pasar Air Tiris dan Pasar Rubio, pemerintah sangat mengharapkan ninik mamak dapat selalu mendukung program yang tengah dilaksanakan, memberi pemahaman kepada anak kemenakan, agar dilapangan tidak ditemui kendala akibat ada yang tidak bisa menerima ganti rugi yang ditetapkan pemerintah. Jadi, dalam tataran tertentu adat istiadat dan kebudayaan digunakan selain sebagai ajang kontestasi dengan puak lain sekaligus menjadi alat untuk melancarkan kepentingan ekonomi.

Satu hal yang menarik tentang Kampar ini bahwa mereka menyebut dirinya sebagai serambi Mekkah, yang artinya terdapat keterkaitan erat antara masyarakat di sana dengan agama Islam. Akan tetapi, posisi adatnya juga begitu kuat sehingga kontradiksi (Islam yang patrilineal dengan adat yang matrilineal) tidak dapat dihindarkan. Walaupun demikian, ternyata hal itu tidak menjadi permasalahan karena pada kenyataannya, adat yang diterapkan hal-hal sebatas seremonial, maskot, dan simbol-simbol saja. Legitimasi adat muncul untuk mendukung aspek-aspek lain, bukan dirinya sendiri.***